

KABUPATEN BALANGAN

Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah Tahun 2024



Jalan A. Yani No. 01 Telp. (0526) 2028395 Fax. (0526) 2028248 Paringin Selatan
Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos 71662

DAFTAR ISI

Daftar Isi	1
Kata Pengantar	2
Ringkasan Eksekutif	3
Bab I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Tujuan	6
1.4 Gambaran umum SKPD	6
Bab II Perencanaan Kinerja	9
2.1 Perencanaan Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2021 Berpedoman pada Rencana Strategis (RESNSTR) 2021-2026	9
2.1.1 Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026	12
2.1.2 Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat	13
2.1.3 Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah	13
2.2 Perencanaan Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2021 Berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026	21
2.2.1 Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah tahun 2021-2026	21
2.2.2 Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat	22
2.2.3 Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah	22
Bab III Akuntabilitas Kinerja	51
3.1 Hasil Pengukuran Atas Capaian Kinerja Tahun 2024	70
3.2 Pengukuran Kinerja Sasaran	71
3.3 Analisis Capaian Kinerja Sasaran	85
3.4 Realisasi Anggaran	103
3.5 Inovasi	103
3.6 Hasil Evaluasi Sakip Setda Dari Inspektorat	106
Bab IV Penutup	109

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Sekretariat Daerah menyusun Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2024.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Sekretariat Daerah tahun 2024 dan analisisnya, Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Sekretariat Daerah pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan pada umumnya.

Paringin, Februari 2025,

Sekretaris Daerah,



H. SUTIKNO, AP., M.AP

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19760417 199412 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sekretariat Daerah merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUB) Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pelayanan administratif.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2024 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2024.

Kabupaten Balangan menyusun RPJMD baru pada tahun 2021, yang disahkan di bulan September 2021, sehingga seluruh SKPD telah menggunakan tujuan, sasaran dan indikator baru sejak bulan September 2021. Dampak dari hal tersebut Sekretariat Daerah pada LAKIP ini akan menyampaikan capaian Renstra 2016-2021 dan capaian Renstra 2021-2026

Berdasarkan Renstra 2016-2021 Sekretariat Daerah memiliki 4 (empat) sasaran dan 6 (enam) indikator. Dan berdasarkan Renstra 2021-2026 melaksanakan 1 (satu) sasaran dan 4 (empat) indikator.

Pencapaian Target Sasaran berdasarkan Renstra 2016-2021, pada tahun 2021 merupakan pencapaian target akhir atau bisa dikatakan sebagai laporan akhir masa jabatan. Dari 6 indikator terdapat 1 (satu indikator yang mana sampai laporan ini disusun data belum tersedia yaitu nilai Indeks Reformasi Birokrasi. Sedangkan 5 (lima) indikator lainnya telah tercapai dan berhasil dilaksanakan dan di pertengahan tahun 2024 mengalami perubahan Indikator yang menjadi 4 (empat) indikator.

Pencapaian Target Sasaran berdasarkan Renstra 2021-2026 dilaporkan untuk pencapaian tahun 2021 dengan waktu pelaksanaan sejak bulan September sampai dengan Desember 2021, namun terbatasnya waktu pelaksanaan ini tidak menjadi penghambat tercapaian target indikator sasaran. Terdapat 1 Sasaran dengan 4 Indikator Sasaran dengan capaian berhasil.

Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja di Sekretariat Daerah merupakan hasil kerja sama segenap jajaran Sekretariat Daerah, serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas OPD. Untuk tahun 2024, Sekretariat Daerah berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance dan clean governance*.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Latar belakang penyusunan Laporan Kinerja (LKIP) Sekretariat Daerah Tahun 2024 adalah adanya keinginan yang kuat dari Sekretariat Daerah untuk mewujudkan *Good governance*, berlandaskan pada *TAP MPR RI No.XI/MPR/1998 dan UU No.28 Tahun 1999* tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang aturan pelaksanaannya didasarkan pada INPRES No. 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Perwujudan *Good governance* ini diimplementasikan oleh Sekretariat Daerah dalam tiga pilar tata pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, antara lain, menyebutkan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas inilah yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretariat Daerah sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Balangan memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Balangan 2021 – 2026 yaitu :

“MEMBANGUN DESA MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA”

Dengan pelaksanaan 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan, pariwisata dan ekonomi kreatif
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan;
4. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi Negara;
5. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan yang berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
2. Belum optimalnya tata kelola dan penyelenggaraan Pemerintahan daerah;
3. Belum optimalnya pemberian pelayanan prima kepada masyarakat.

Untuk memenuhi harapan di atas, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan akan berperan mengkoordinasikan dalam perumusan kebijaksanaan Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Daerah, yang menjadi komitmen bersama.

1.2 Landasan Hukum

1. UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. INPRES No. 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
11. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026
15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
16. Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

1.3 Tujuan Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah menetapkan tujuan dengan langsung menjadikan Sasaran pada RPJMD Kabupaten tahun 2021-2026 sebagai pedoman yaitu **Meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi**. Pemilihan tujuan dilakukan dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis serta sebagai komitmen terhadap pengampuan Sekretariat daerah pada misi ke-4 RPJMD yaitu **Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi Negara**. Adapun indikator Tujuan Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Persentase SKPD dengan capaian IKK tinggi
2. Nilai Budaya Kerja SETDA
3. Nilai IKM SETDA
4. Nilai SAKIP SETDA

1.4 Gambaran Umum Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pelayanan administratif.

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugasnya menjalankan fungsi sebagai berikut :

1. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
2. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
4. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

tabel 1.1
Unsur Organisasi pada Sekretariat Daerah berdasarkan
Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021

NO.	Unsur Organisasi Sekretariat Daerah	
1	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
	1	Bagian Pemerintahan
		Sub Bagian Administrasi Pemerintahan;
		Sub Bagian Administrasi Kewilayahan; dan
		Sub Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah;
	2	Bagian Kesejahteraan Rakyat
		Sub Bagian Bina Mental Spiritual;
		Sub Bagian Kesejahteraan Sosial; dan
		Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat
	3	Bagian Hukum
		Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Daerah;
		Sub Bagian Bantuan Hukum; dan
		Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi
2	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
	a.	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
		Sub Bagian Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD;
		Sub Bagian Perekonomian;

NO.	Unsur Organisasi Sekretariat Daerah	
		Sub Bagian Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil; dan
		Sub Bagian Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD
	b.	Bagian Administrasi Pembangunan
		Sub Bagian Penyusunan Program;
		Sub Bagian Pengendalian Program; dan
		Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
	c.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
		Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
		Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
		Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
3	Asisten Administrasi Umum	
	a.	Bagian Umum
		Sub Bagian Penyusunan Dok Perenc Perangkat Daerah;
		Sub Bagian Koord dan Penyusunan Lap Capaian Kinerja;
		Sub Bagian Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
		Sub Bagian Pelaks Penatausahaan Pengujian/ Verf Keuangan SKPD;
		Sub Bagian Koordinasi dan Peny Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD;
		Sub Bagian Koordinasi dan Peny Lap Keuangan Triwulan SKPD;
		Sub Bagian Koordinasi dan Peny Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD;
		Sub Bagian Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
		Sub Bagian Penyediaan Komponen Instalasi Listrik;
		Sub Bagian Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
		Sub Bagian Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
		Sub Bagian Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
		Sub Bagian Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
		Sub Bagian Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD;
		Sub Bagian Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik;
		Sub Bagian Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
		Sub Bagian Penyediaan jasa Pelayanan umum kantor;

NO.	Unsur Organisasi Sekretariat Daerah	
		Sub Bagian Penyediaan jasa Pemeliharaan, Pajak Kendaraan ;
		Sub Bagian Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
		Sub Bagian Pemeliharaan Gedung kantor dan Bangunan;
		Sub Bagian Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor;
		Sub Bagian Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor;
		Sub Bagian penyediaan Gaji dan Tunjangan KD dan WKD;
		Sub Bagian penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut KD dan WKD; dan
		Sub Bagian penyediaan Dana Operasional KD dan WKD
	b.	Bagian Organisasi
		Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
		Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan
		Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
	c.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		Sub Bagian Fasilitasi keprotokolan;
		Sub Bagian Komunikasi Pimpinan; dan
		Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan.
4	Kelompok Jabatan Fungsional	

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah tahun 2024 Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah 2021 – 2026 serta menjawab Perjanjian Kinerja Murni Sekretariat Daerah Tahun 2024 Pada Bulan Januari sampai dengan Agustus 2024 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Pada Bulan September sampai dengan Desember 2024.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Sekretariat Daerah untuk mencapainya

A. Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Balangan terpilih periode 2021-2024 menetapkan visi yang akan menjadi arah penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten Balangan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Sejak di tetapkannya Renstra 2021-2026 pada bulan September 2021, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan disusun dan diarahkan untuk pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Balangan Bupati dan Wakil Kepala Bupati Terpilih. Penetapan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan ini juga diperkuat dengan perubahan Nomenklatur yang di dalam Perda Nomor 2 tahun 2021. Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Balangan tahun 2021-2026 Setda mengampu :

Misi ke 4 : Meningkatkan Kualitas dan Layanan Birokrasi Pemerintahan Sebagai Abdi Masyarakat dan Abdi Negara.

Tujuan : Meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi

Misi ke 5 : Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi Negara.

Pemilihan tujuan dilakukan dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis serta sebagai komitmen terhadap pengampunan Sekretariat daerah pada misi ke-5 RPJMD yaitu **Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi Negara.**

Adapun indikator Tujuan Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Nilai SAKIP Kabupaten
2. Persentase SKPD dengan capaian IKK tinggi
3. Nilai Budaya Kerja Kabupaten
4. Nilai IKM Kabupaten
5. Nilai SAKIP Kabupaten

Pada pertengahan tahun 2024 Sekretariat Daerah mengalami perubahan indikator sebagai berikut:

1. Persentase SKPD dengan Capaian IKK Tinggi
2. Nilai Budaya Kerja SETDA
3. Nilai IKM Kabupaten
4. Nilai SAKIP SETDA

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, diturunkan menjadi 2 (dua) sasaran Sekretariat Daerah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan yang baik

Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas layanan tata kelola perangkat daerah

A. RENCANA KERJA TAHUN 2024

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 terdiri dari 3 (Tiga) Program sebagai berikut:

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	142.799.186.565,-
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	165.705.719.700,-
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.705.464.400,-
JUMLAH	313.210.370.665,-

Tujuan Sekretariat Daerah berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026

Tujuan Sekretariat Daerah	Indikator Tujuan Setda	Target Indikator Tujuan pada Tahun ke-					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN AKUNTABEL	Nilai Reformasi Birokrasi General dan Tematik				100%		

**RENCANA KINERJA DAN ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN
1	2	3	4
Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan yang baik	Persentase SKPD dengan Capaian IKK Tinggi	100%	
	Keg. Administrasi Tata Pemerintahan		Rp 1.917.826.000,-
	Sub Keg. Penataan Administrasi Pemerintahan		Rp 1.061.106.000,-
Meningkatkan kualitas layanan tata kelola perangkat daerah	Nilai Budaya Kerja SETDA	79,51	
	Keg. Penataan Organisasi		Rp 2.755.209.000,-
	Sub Keg. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata LaksanaSub. Keg		Rp 1.225.795.000,-
	Nilai IKM SETDA	89,73	
	Keg. Penataan Organisasi		Rp 2.755.209.000,-
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata LaksanaSub. Keg		Rp 411.140.000,-
	Nilai SAKIP SETDA	75,15	
	Keg. Penataan Organisasi		Rp. 2.755.209.000
	Sub Keg. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		Rp. 1.225.795.000,-

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Perangkat Daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2024

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		2024	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik	1	Persentase SKPD dengan Capaian IKK Tinggi	100%	Bagian TAPEM
	Meningkatnya Kualitas Layanan Tata Kelola Perangkat Daerah	2	Nilai Budaya Kerja SETDA	79,51	Bagian Organisasi
		3	Nilai IKM SETDA	89,73	Bagian Organisasi
		4	Nilai SAKIP SETDA	75,15	Bagian Organisasi

Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah

Untuk Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021- 2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2.1 (3)

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026 SEKRETARIAT DAERAH

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik	Persentase SKPD dengan Capaian Nilai IKK Tinggi	<p>Makna : IKK kabupaten/kota merupakan hasil evaluasi oleh Tim Daerah yang kemudian</p> <p>Alasan Pemilihan : Dengan nilai IKK Pemerintah Kabupaten Balangan yang semakin meningkat maka dapat diukur capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah baik pada level pemerintah daerah sampai pada SKPD</p> <p>Perhitungan atau penjelasan : Hasil SKPD dengan Capaian Nilai IKK Tinggi</p>	Bagian TAPEM	Seluruh SKPD

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP SETDA	<p>Makna : Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (E-SAKIP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Reformasi dan Birokrasi terhadap substansi [Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja , evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran kinerja</p> <p>Alasan Pemilihan : Sekretariat Daerah yang merupakan salah satu SKPD yang berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mampu mengukur tingkat akuntabilitas kinerja baik itu level Pemda, SKPD hingga ke Individu Pegawai.</p> <p>Perhitungan atau penjelasan : LHE SAKIP kemenpan RB</p>	Bagian Organisasi	Bappedalitbang Inspektorat Bagian Organisasi

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		Nilai IKM SETDA	<p>Makna : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah merupakan suatu ukuran untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan public selanjutnya.</p> <p>Alasan Pemilihan : Dalam rangka mewujudkan tingkat kinerja masing-masing unit pelayanan instansi pemerintah, juga dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai secara obyektif dan periodic terhadap perkembangan unit pelayanan public</p>	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi dan seluruh UPP (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		Nilai Budaya Kerja SETDA	<p><u>Makna :</u></p> <p><u>Alasan Pemilihan :</u> guna memperoleh gambaran tentang kondisi kinerja penyelenggaraan Budaya Kerja untuk kemudian dilakukan perbaikan dalam rangka peningkatan</p>	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi dan seluruh UPP (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)

C. Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024

Sebagai bentuk upaya mewujudkan Kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis 2021–2026, maka target–target kinerja tahunan yang tercantum dalam Rencana Strategis dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DAERAH

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efisien dan Akuntabel	Nilai Pelaporan SAKIP	(BB) 74.4
		Persentase SKPD dengan Capaian IKK Tinggi	100%
		Nilai IKM SETDA	84.00
		Nilai Budaya Kerja SETDA	79.51
		Nilai SAKIP SETDA	74.4

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Hasil Pengukuran Atas Capaian Kinerja Tahun 2024

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik. Analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Analisis tersebut meliputi keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan mengacu pada program utama Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 yang tertuang dalam RKPD Tahun 2024 sebagai rujukan/acuan bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun program kerja, maka ditetapkan sasaran dalam rencana kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 untuk memberikan arah kebijakan, program dan kegiatan pada Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat sehingga pencapaian kinerja dalam tujuan, sasaran dan program dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan dapat terlaksana dengan baik.

Tabel 3.1 Realisasi Tujuan Sekretariat Daerah Tahun 2024 Sebagaimana tabulasi di bawah ini :

Tujuan Sekretariat Daerah	Indikator Tujuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN AKUNTABEL	Nilai Reformasi Birokrasi General dan Tematik	100%	100%	100%

Berdasarkan pencapaian kinerja sekretariat daerah kabupaten balangan yang tersaji pada table 3.1 dapat dilihat bahwa indikator tujuan yaitu nilai reformasi birokrasi general dan tematik dengan capaian 100%.

B.PENGUKURAN KINERJA SASARAN

Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan diukur dari tercapainya 2 (dua) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Tata Kelola Perangkat Daerah

hasil pengukuran capaian kinerja sekretariat daerah tahun 2024 sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Sasaran

No	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian Terhadap Akhir Renstra(%)	Serapan Anggaran %	Efektifitas dan Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik	Persentase SKPD dengan Capaian Nilai IKK Tinggi	100%	100%	100	100	100	89,55%	

No	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian Terhadap Akhir Renstra(%)	Serapan Anggaran %	Efektifitas dan Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai Budaya Kerja SETDA	87.50	87.07	99,50	79.51	109,50	92,78%	
		Nilai IKM SETDA	84.00	89,73	106,82	85	105,56	92,78%	
		Nilai SAKIP SETDA	72.40	BB=75,15	103,79	BB=78,2	96,09	96,85%	

Sasaran strategis meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan indikator SKPD dengan capaian nilai IKK tinggi dari target, realisasi, dan capaian adalah 100%. Sasaran strategis meningkatnya kualitas layanan tata Kelola perangkat daerah dengan indikator nilai budaya kerja setda target 87,50, realisasi 87,07, dan capaian 99,50%, nilai IKM SETDA target 84,00, realisasi 89,73, capaian 106,82%, dan nilai SAKIP SETDA target 72,40, realisasi 75,15, dan capaian 103,79%.

C.ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik

Tabel 3.3 Analisis Capaian Strategis 1

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	Kinerja Tahun 2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian Terhadap Akhir Renstra(%)	Realisasi Capaian Terhadap Kabupaten/Kota	Realisasi Capaian Terhadap Provinsi/Nasional
			Target	Realisasi	Capaian (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik	100%	100%	100%	100	100	100		

Dari Tabel 3.3. pencapaian persentasi SKPD dengan capaian nilai IKK tinggi sama dengan tahun sebelumnya yaitu 100%. Penilaian ini diambil dari pemenuhan data urusan yang disampaikan SKPD kepada bagian pemerintahan sebagai bahan pengisian IKK masing-masing urusan diseluruh SKPD di Kabupaten Balangan. Apabila semua SKPD dapat memenuhi semua data dukung sesuai dengan pengisian tabel IKK maka capaian urusan pemerintahan dinyatakan 100%

a. perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Untuk persentasi SKPD dengan capaian nilai IKK tinggi tercapai dengan nilai persentase 100%.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian tahun 2024 dengan tahun 2023

Untuk persentasi SKPD dengan capaian nilai IKK tinggi tercapai dengan nilai persentase 100%.

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam renstra

Realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam renstra nilai persentase IKK 100%

d. Perbandingan realisasi kinerja 2024 dengan kabupaten lain / kota

Realisasi kinerja 2024 dengan kabupaten lain / kota tidak ada.

e. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif Solusi yng telah dilakukan

Adapun keberhasilan pencapain nilai IKK melalui hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang dengan memenuhi semua data dukung sesuai dengan pengisian tabel IKK dan sebaliknya jika penyelenggara data pemerintah tidak memenuhi data dukung maka nilai IKK turun.

f. Analisis atas efisiensi atas sumber daya

No	Nama Program	Target Kinerja	Relisasi Kinerja	Capaian	Anggaran murni	Anggaran Perubahan	Persen Realisasi	Efisiensi
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	100%	100%	Rp.125.556.079.700	Rp165.705.719.700	86,30%	Rp22.704254.236

Dilihat dari tabel di atas dapat disimpulkan dengan indikator persentasi SKPD dengan capaian nilai IKK tinggi dengan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat target

100% dengan anggaran murni Rp. 125.556.079.700 dan anggaran setelah perubahan menjadi Rp165.705.719.700 dengan serapan anggaran 86,30% sehingga efisiensi anggaran diperoleh sebesar Rp22.704254.236.

- g. analisis atas program/kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang pencapaian program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dengan forum diskusi, pelaporan, dan pengumpulan data dukung IKK urusan urusan pemerintahan.

2. Meningkatnya Kualitas Layanan Tata Kelola Perangkat Daerah

TABEL Tabel 3.3 Analisis Capaian Strategis 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	Kinerja Tahun 2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian Terhadap Akhir Renstra(%)	Realisasi Capaian Terhadap Kabupaten/ Kota	Realisasi Capaian Terhadap Provinsi/Nasional
				Target	Realisasi	Capaian (%)				
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai Budaya Kerja SETDA	100	87.50	87.07	99,50	79.51	109,50		
		Nilai IKM SETDA	105,05	84.00	89,73	106,82	85	105,56		
		Nilai SAKIP SETDA	93,81	72.40	BB=75,15	103,79	BB=78,2	96,09		

a.1 Nilai Budaya Kerja SETDA

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Untuk nilai budaya kerja SETDA dengan capaian 99,50% Adapun untuk target 87,50 dan realisasi 87,07.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian tahun 2024 dengan tahun 2023

Untuk nilai budaya kerja SETDA mengalami penurunan dari tahun sebelumnya adalah 100% menjadi 99,50%

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam renstra

Karena terjadi perubahan IKU pada cascading sekretariat daerah untuk indikator nilai budaya kerja maka perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam renstra tidak ada

d. Perbandingan realisasi kinerja 2024 dengan kabupaten lain / kota

Karena terjadi perubahan IKU pada cascading sekretariat daerah untuk indikator nilai budaya kerja maka perbandingan realisasi kinerja 2024 dengan kabupaten lain/kota tidak ada

e. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Faktor Pendukung peningkatan nilai Budaya kerja adalah penilaian budaya kerja dinilai pertahun dengan pertanyaan yang sama sehingga dapat membandingkan kondisi tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya dan dilakukan perbaikan

Faktor penghambat utama dalam peningkatan nilai budaya kerja adalah kurangnya kesadaran dari SKPD untuk memenuhi bukti dukung yang diperlukan. Bukti dukung, seperti dokumentasi atau laporan yang relevan yang merupakan elemen penting dalam proses evaluasi budaya kerja. Tanpa adanya bukti dukung yang memadai, usaha untuk menilai sejauh mana nilai budaya kerja telah diterapkan dalam organisasi menjadi terhambat, karena tidak ada data yang cukup untuk mengukur atau mendukung klaim yang ada.

Rencana kedepan untuk meningkatkan nilai budaya kerja di organisasi ini akan fokus pada beberapa langkah strategis yang dirancang untuk mengatasi hambatan yang ada dan memperkuat elemen-elemen yang sudah berjalan dengan baik. Salah satu prioritas utama adalah meningkatkan kesadaran di seluruh tingkat organisasi mengenai pentingnya kontribusi aktif dalam menyediakan bukti dukung yang tepat

f. Analisis atas efisiensi atas sumber daya

No	Nama Program	Target Kinerja	Relisasi Kinerja	Capaian	Anggaran murni	Anggaran Perubahan	Persen Realisasi	Efisiensi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87.50	87.07	99,50	Rp.110.993.120.011	Rp.142.799.186.565	91,80%	Rp11.713.815.967

Dilihat dari tabel di atas dapat disimpulkan dengan indikator nilai budaya kerja dengan program penunjang urusan pemerintah daerah target 87,50% dengan anggaran murni Rp. 110.993.120.011 dan anggaran setelah perubahan menjadi Rp.142.799.186.565 dengan serapan anggaran 91,80% sehingga efisiensi anggaran diperoleh sebesar Rp11.713.815.967.

2.2 Nilai IKM SETDA

a.Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Target dan realisasi kinerja tahun 2024 untuk nilai IKM SETDA dengan capaian 106,82% Adapun untuk target 84,00 dan realisasi 89,73.

b.Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian tahun 2024 dengan tahun 2023

Realisasi kinerja serta capaian tahun 2024 dengan tahun 2023 untuk nilai IKM SETDA mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya adalah 105,05% menjadi 106,82%

c.Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam renstra

Dalam hasil analisis perbandingan realisasi kinerja dengan target dalam renstra jangka menengah tidak ada dikarenakan adanya perubahan IKU pada renstra perubahan

d.Perbandingan realisasi kinerja 2024 dengan kabupaten lain / kota

Realisasi kinerja 2024 dengan kabupaten lain / kota tidak ada

e. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Menunjang keberhasilan pencapaian IKM SETDA yaitu di dukung oleh peningkatan SDM pengelola SKM, Peningkatan Sarana dan Prasarana yang dimiliki serta adanya regulasi yang memadai seperti ketersediaan sop, sp.

f. Analisis atas efisiensi atas sumber daya

No	Nama Program	Target Kinerja	Relisasi Kinerja	Capaian	Anggaran murni	Anggaran Perubahan	Persen Realisasi	Efisiensi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	84.00	89.73	106.82	Rp.110.993.120.011	Rp.142.799.186.565	91,80%	Rp11.713.815.967

Dilihat dari tabel di atas dapat disimpulkan dengan indikator nilai IKM SETDA dengan program penunjang urusan pemerintah daerah target 84.00% dengan anggaran murni Rp. 110.993.120.011 dan anggaran setelah perubahan menjadi Rp.142.799.186.565 dengan serapan anggaran 91,80% sehingga efisiensi anggaran diperoleh sebesar Rp11.713.815.967.

2.3 Nilai SAKIP SETDA

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Target dan realisasi kinerja tahun 2024 untuk nilai SAKIP SETDA dengan capaian 103,79% Adapun untuk target 72,40 dan realisasi 75,15.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian tahun 2024 dengan tahun 2023

Realisasi kinerja serta capaian tahun 2024 dengan tahun 2023 Untuk nilai SAKIP SETDA mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya adalah 72,40% menjadi 103,79%

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam renstra

Realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam renstra pada nilai SAKIP SETDA mengalami peningkatan pencapaian realisasi kinerja tahun sebelumnya 73.45, pada

tahun 2024 mengalami kenaikan 75.15 dengan capaian akhir renstra dengan target 78.2.

d.Perbandingan realisasi kinerja 2024 dengan kabupaten lain / kota

Realisasi kinerja 2024 dengan kabupaten lain / kota lebih meningkat dari kota yang lain karena nilai SAKIP SETDA yaitu BB

e.Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif Solusi yng telah dilakukan

Keberhasilan/ peningkatan pencapaian nilai SAKIP SETDA melaporkan data-data akuntabilitas sesuai dengan arahan, data yang minta, dan tepat waktu dalam pelaporan.

f. Analisis atas efisiensi atas sumber daya

No	Nama Program	Target Kinerja	Relisasi Kinerja	Capaian	Anggaran murni	Anggaran Perubahan	Persen Realisasi	Efisiensi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	72.40	75.15	103.79	Rp.110.993.120.011	Rp.142.799.186.565	91,80%	Rp11.713.815.967

Dilihat dari tabel di atas dapat disimpulkan dengan indikator nilai SAKIP SETDA dengan program penunjang urusan pemerintah daerah target 72.40% dengan anggaran murni Rp. 110.993.120.011 dan anggaran setelah perubahan menjadi Rp.142.799.186.565 dengan serapan anggaran 91,80% sehingga efisiensi anggaran diperoleh sebesar Rp11.713.815.967.

D.REALISASI ANGGARAN

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2024 yang dievaluasi		Nilai Efisiensi %
			K	Rp	K	Rp	
1	3	4	7		12		%
			K	Rp	K	Rp	
	TUJUAN : TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN AKUNTABEL SASARAN 2 : Meningkatkan Kualitas Layanan Tata Kelola Pemerintahan Daerah						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi kebijakan bidang pengadministrasi umum yang terlaksana	100%	142.799.186.565	100%	131.085.370.598	91.80%
		Rata-Rata capaian kinerja SKPD dan unit kerja garis koordinasi	100%		100%		
	Penataan Organisasi	Indeks Komposit Kelembagaan	50	2.755.209.000	0	2.519.430.464	91.44%
		Persentase SKPD dengan Dokumen Jabatan Langkap	100%		100%		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2024 yang dievaluasi		Nilai Efisiensi
		Nilai Rata-rata IKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Non UPP yang Bernilai Baik	84		0		
		Persentase SKPD yang Memiliki Dokumen Ketatalaksanaan Baik	100%		0%		
		Nilai Laporan Kinerja Pemda	14.26		0		
		Persentase SKPD dengan Kualifikasi Nilai Sakip BB	75.76 %		0%		
		Nilai IPP SKPD Sampel	0		0		
		Persentase SKPD dengan Nilai Budaya Kerja Baik	36.36 %		0%		
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	65 Dokumen	1.118.274.000	65 Dokumen	950.741.850	85.02%
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 Laporan	411.140.000	4 Laporan	381.466.310	92.78%
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	4 Dokumen	1.225.795.000	4 Dokumen	1.187.222.304	96.85%
	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)						
	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)						

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2024 yang dievaluasi	Nilai Efisiensi		
	TUJUAN : TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN AKUNTABEL SASARAN 1 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik						
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Realisasi Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang terlaksana	100%	165.705.719.700	100%	143.001.465.464	86.30%
		Persentase Realisasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang terlaksana	100%		100%		
		Rata-rata capaian kinerja SKPD dan Unit Kerja Garis Koordinasi	100%		100%		

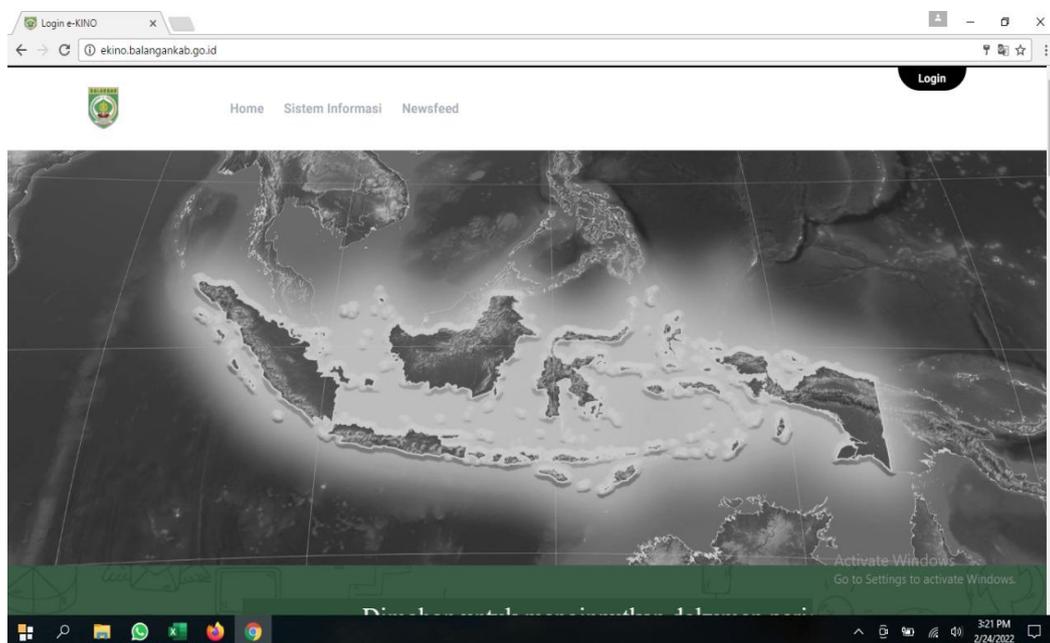
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2024 yang dievaluasi		Nilai Efisiensi
	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase kebijakan di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan/diterapkan oleh SKPD	100%	1.917.826.000	100%	1.731.288.071	90.27%
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	4 Dokumen	1.061.106.000	4 Dokumen	950.197.566	89.55%
	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)						
	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)						

Berdasarkan Tabel dapat dilihat bahwa alokasi anggaran terbesar dialokasikan untuk mendukung pencapaian Sasaran ke-2. Dibandingkan yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian Sasaran ke-1. Adapun penggambaran alokasi anggaran di Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan. Untuk mengetahui pencapaian realisasi anggaran, maka dilakukan perbandingan capaian kinerja dengan capaian anggaran.

E. INOVASI

E-Kino adalah aplikasi merupakan system informasi e-Reformasi Birokrasi yang tujuannya mengevaluasi dokumen, data akuntabilitas (perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi) pada kinerja SKPD Se- Kabupaten Balangan.

1. Aplikasi EKINO



Pada tahun 2022 – 2024 terus melakukan upgrade dilakukan beberapa inovasi untuk mempermudah pelaksanaan rencana aksi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan tidak hanya di Sekretariat Daerah namun digunakan pula oleh seluruh SKPD di Kabupaten Balangan. Adapun Inovasi tersebut berupa pembuatan Aplikasi sebagai berikut:

2. Aplikasi SI-ABANG



Aplikasi Si Open merupakan inovasi milik unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) Kabupaten Balangan yang sangat membantu dan mempermudah para SKPD dalam memproses pengadaan barang dan jasa untuk menguntungkan UMKM dan pengusaha lokal yang ada di balangan yang berasaskan transparansi dan menjauhkan dari Tindakan korupsi. Si Open ini juga sangat membantu para penyedia barang dan jasa dalam menawarkan produknya.

3. Aplikasi Si Open



F.HASIL AVALUASI SAKIP SETDA DARI INSPEKTORAT

No	HASIL EVALUASI	REKOMENDASI	RENCANA AKSI
1.	Perencanaan	Menyempurnakan diagram crosscutting yang menunjukkan kesinambungan antar unit organisasi atau unit kerja lain untuk pencapaian tujuan dan sasaran kinerja	Menyempurnakan diagram crosscutting yang menunjukkan kesinambungan antar unit organisasi atau unit kerja lain untuk pencapaian tujuan dan sasaran kinerja
2.	Pelaporan	sudah membuat laporan Kinerja sekretariat Daerah untuk dapat memuat informasi mengenai realisasi dan efisiensi anggaran berdasarkan target dan realisasi kinerja	sudah membuat laporan Kinerja sekretariat Daerah untuk dapat memuat informasi mengenai realisasi dan efisiensi anggaran berdasarkan target dan realisasi kinerja
		Pada Laporan Kinerja Sekretariat Daerah untuk dapat melakukan analisis dan penjabaran kinerja seluruh pegawai mulai dari target dan realisasi capaian kinerja tujuan dan sasaran sampai dengan analisis capaian kinerja pegawai dari eselon III, jabatan fungsional dan staff	Telah Laporan Kinerja Sekretariat Daerah untuk dapat melakukan analisis dan penjabaran kinerja seluruh pegawai mulai dari target dan realisasi capaian kinerja tujuan dan sasaran sampai dengan analisis capaian kinerja pegawai dari eselon III, jabatan fungsional dan staff
		Pada Laporan kinerja Sekretariat Daerah untuk dapat menyajikan informasi mengenai perbandingan realisasi capaian kinerja SKPD / Pemda dengan data realisasi capaian nasional seperti rata – rata capaian Pemerintah Indonesia melalui data antar Kab/Kota dalam lingkup Provinsi Kalimantan Selatan	Telah membuat laporan kinerja Sekretariat sudah menyajikan informasi mengenai perbandingan realisasi capaian kinerja SKPD/ Pemda dengan data realisasi capaian nasional seperti rata rata capaian pemerintah indonesia melalui data antar Kab/ Kota dalam lingkup Propinsi Kalimantan Selatan
		Pada Bab Penutup Laporan kinerja Sekretariat Daerah untuk dapat memuat upaya antisipasi untuk perencanaan kinerja tahun berikutnya	akan membuat Laporan kinerja Sekretariat Daerah di awal tahun 2025 yang dapat memuat upaya antisipasi untuk perencanaan kinerja tahunan berikutnya

No	HASIL EVALUASI	REKOMENDASI	RENCANA AKSI
3.	Evaluasi	Upaya perbaikan atau Rencana aksi atas faktor hambatan kinerja pada Monev yang disusun untuk dapat dilaksanakan sehingga terjadi peningkatan realisasi target setiap triwulan ataupun capaian sasaran dan target tahunan	telah melakukan perbaikan atau rencana aksi atas faktor hambatan kinerja pada monev yang disusun untuk dapat melaksanakan sehingga terjadi peningkatan realisasi target setiap triwulan ataupun capaian sasaran dan target tahunan

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Balangan disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance*. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Laporan akuntabilitas ini disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2024, serta Penetapan Kinerja Tahun 2024. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari sasaran dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Capaian indikator tujuan SKPD Berdasarkan Renstra 2021-2026

Pada Renstra baru terdapat 1 tujuan, 2 sasaran, 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, 2. Meningkatnya kualitas layanan tata Kelola perangkat daerah. dengan 4 indikator. Dari 4 indikator tersebut 3 indikator tidak dapat disampaikan data capaiannya karena data belum tersedia. Adapaun indikator tersebut adalah persentase SKPD dengan capaian Nilai IKK Tinggi, nilai budaya kerja SETDA, nilai IKM SETDA, nilai SAKIP SETDA

2. Upaya perbaikan berdasarkan hasil Rekomendasi Inspektorat hasil LHE terhadap Lakip Sekretariat Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan
 - a. Menyempurnakan diagram crosscutting yang menunjukkan kesinambungan antar unit organisasi atau unit kerja lain untuk pencapaian tujuan dan sasaran kinerja
2. Pelaporan
 - a. sudah membuat laporan Kinerja sekretariat Daerah untuk dapat memuat informasi mengenai realisasi dan efisiensi anggaran berdasarkan target dan realisasi kinerja
 - b. Pada Laporan Kinerja Sekretariat Daerah untuk dapat melakukan analisis dan penjabaran kinerja seluruh pegawai mulai dari target dan realisasi capaian kinerja tujuan dan sasaran sampai dengan analisis capaian kinerja pegawai dari eselon
 - c. Pada Laporan kinerja Sekretariat Daerah untuk dapat menyajikan informasi mengenai perbandingan realisasi capaian kinerja SKPD / Pemda dengan data realisasi capaian nasional seperti rata – rata capaian Pemerintah Indonesia melalui data antar Kab/Kota dalam lingkup Provinsi Kalimantan Selatan
 - d. Pada Bab Penutup Laporan kinerja Sekretariat Daerah untuk dapat memuat upaya antisipasi untuk perencanaan kinerja tahun berikutnya
3. Evaluasi
 - a. Upaya perbaikan atau Rencana aksi atas faktor hambatan kinerja pada Monev yang disusun untuk dapat dilaksanakan sehingga terjadi peningkatan realisasi target setiap triwulan ataupun capaian sasaran dan target tahunan.

Paringin, Februari 2025,

Sekretaris Daerah,



H. SUTIKNO, AP., M.AP

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19760417 199412 1 001